

Waspadai Politik Uang di Pemilihan Lurah

SLEMAN (KR) - Menjelang pemungutan suara pemilihan lurah sangat rawan terjadi politik uang dan kampanye hitam. Selain itu, Tenaga Teknis Lapangan (TTL) diharapkan bisa bekerja secara profesional dan transparan selama menjalankan tugas dalam pemilihan lurah secara e-voting.

Sehingga para calon mempunyai peluang untuk melakukannya. "Terkadang masyarakat terdidik dengan politik uang pada saat pemilihan. Hal itu yang membuat peluang bagi calon lurah untuk melakukan praktik itu," katanya kepada KR, Kamis (17/12).

Tak kalah pentingnya lagi, mendekati hari H pemungutan suara juga rawan terjadi kampanye hitam. Tujuannya untuk menjatuhkan calon lain pada pemungutan suara. "Masyarakat harus hati-hati, jangan mudah percaya dengan kampanye hitam. Tapi memilih calon dengan melihat rekam jejak dan visimisinya," pesan Hempri.

Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Sleman kembali memindahkan satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) pelaksanaan Pemilihan Lurah di Kalitengah Lor. Sama seperti Pilkada beberapa waktu lalu, TPS akan dipindahkan di dekat barak pengungsian

PEMUDA BERKHIDMAT UNTUK MASYARAKAT Pemilihan Calon Kepala Desa Balecatur

DESA Balecatur merupakan salah satu desa yang akan melangsungkan pemilihan kepala desa serentak pada 20 Desember besok ini. ada lima calon yang berkompetisi diantaranya adalah Andri Septiyanto. Pemuda asli Balecatur tersebut tergerak hatinya untuk ikut maju dan berhitung melakukan perubahan di desa Balecatur. Di temui dalam sesi Sapa Warga di Kluweh Andri mengatakan Balecatur dengan segala potensinya seharusnya dapat jauh lebih akseleratif, berkemajuan dan ekonominya dapat dirasakan dampaknya bagi masyarakat sekitar.



Andri Septiyanto
Calon Kepala Desa
Balecatur Nomor Urut 5

apabila ada perangkat desa yang melakukan pungutan liar. Visi Misi ini diharapkan dapat menjawab problem dan permasalahan masyarakat. Program strategis yang akan di jalankan diantaranya Pembentukan BUMDes untuk pengelolaan Ekonomi Desa yang berkemajuan, Reformasi Birokrasi untuk perbaikan kinerja dan optimalisasi Pelayanan Desa, serta Egovernment Desa yaitu optimalisasi program berbasis digital untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan transparansi.

Sementara itu menurut Yoyon Direktur Mitra Strategis Indonesia (Misi Indonesia) Di temui dalam diskusi yang di adakan oleh Forum Silaturahmi Pemuda Balecatur (FSPB) Rabu malam mengatakan bahwa Saat ini adalah eranya Anak Muda, Pemuda adalah masa Depan Bangsa. Kalo kita lihat di luar luar sana Daerah atau desa yang pemimpinnya itu anak muda pasti maju pasti ada gebrakan untuk perubahan dan yang lebih penting masyarakatnya pasti sejahtera. Beruntung di Desa Balecatur ini ada Mas Andri Pemuda yang mau berjuang dalam pemilihan kepala desa demi kemajuan Masyarakatnya. (*)



Calon Kepala Desa Andri Septiyanto Menyapa Petani

Diterpa Pandemi, PAD Tetap Lampau Target

SLEMAN (KR) - Meski diterpa pandemi Covid-19, namun pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sleman 2020 masih bisa melampaui target. Hanya saja untuk serapan anggaran tidak bisa maksimal.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Sleman Sri Purnomo didampingi Kepala BKAD Sleman Haris Sutarto di Pendapa Parasamya, Kamis (17/12).

"Target awal PAD sebelum Covid sebesar Rp 944,48 miliar. Setelah perubahan menjadi Rp 676,74 miliar atau turun 28,35%." Namun al-

1. PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD

1. Pembentukan tim penyusun RPJMD.
2. Orientasi mengenai RPJMD.
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD.
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.
5. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD.

2. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD

1. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD merupakan penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
2. Rancangan awal RPJMD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD.
3. Forum Konsultasi Publik Daerah Kabupaten Sleman melibatkan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan pemangku kepentingan.
4. Kepala Daerah mengajukan Rancangan Awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
5. Rancangan Awal RPJMD disempurnakan berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan yang dirumuskan dalam nota kesepakatan oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD.
6. Bupati mengkonsultasikan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sleman kepada Gubernur untuk memperoleh masukan terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sleman.
7. Bupati menyempurnakan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sleman berdasarkan saran penyempurnaan oleh Gubernur.
8. Rancangan Awal RPJMD menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah.

9. Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
10. Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
11. Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah dipastikan sesuai dengan Rancangan Awal RPJMD.

TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.



Drs. Kunto Riyadi, MPPM
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman

3. PELAKSANAAN MUSRENBANG RPJMD

1. Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam Aancangan Awal RPJMD.
2. Musrenbang RPJMD dihadiri oleh para pemangku kepentingan.

4. PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RPJMD

- Perumusan Rancangan Akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi Rancangan Akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD.

5. PENETAPAN RPJMD

1. Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Sleman yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang RPJMD Kabupaten Sleman.
2. RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.